

## PENGARUH EFEKTIVITAS PENCEGAHAN FRAUD PENGADAAN BARANG/JASA PADA ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KOTA PALEMBANG

Sopiyan A.R<sup>1</sup>, Firmansyah<sup>2</sup>, Edwin Frimaruwah<sup>3</sup>, Periansya<sup>4</sup>,  
Regita Indah Sari<sup>5</sup>, Ayu Septiawati<sup>6</sup>, Dian Islamiati<sup>7</sup>  
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya  
email: [sopian\\_ar@polsri.ac.id](mailto:sopian_ar@polsri.ac.id)

### *Abstract*

*This study's examines the effect of effectiveness to prevent fraud in procurement goods/services on regional government organizations of Palembang city. This study used samples obtained from 29 OPD are consist of 24 agencies and 5 agencies with 116 respondents. The research is quantitative in nature, and also uses primary data as the data source. The data collection uses a survey method by distributing questionnaires to respondents. The data already have analyzed by multiple linear regression using software SPSS. The results showed that e-procurement and the government's internal control system simultaneously had a positive and significant effect on the effectiveness to prevent fraud in procurement goods/ services with a determination coefficient of 83.3%. Then e-procurement and the government's internal control system have a positive impact on the effectiveness to prevent fraud in procurement goods/services.*

**Keywords:** *E-procurement, Government Internal Control System, Effectiveness of Fraud Prevention, Procurement of Goods/Services.*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji pengaruh efektivitas dalam mencegah kecurangan pengadaan barang/jasa pada organisasi pemerintah daerah Kota Palembang. Penelitian menggunakan sampel yang diperoleh dari 29 OPD yang terdiri dari 24 dinas dan 5 badan dengan 116 responden. Penelitian ini bersifat kuantitatif menggunakan data primer sebagai sumber datanya. Metode yang dipakai berupa survei dengan menyebarkan kuisisioner kepada para responden. Data telah dianalisis dengan regresi linier berganda melalui *software* SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-procurement* dan sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan pengadaan barang/ jasa dengan koefisien determinasi 83,3%. Kemudian *e-procurement* serta sistem pengendalian intern pemerintah berdampak positif terhadap efektivitas mencegah kecurangan dalam pengadaan barang/ jasa.

**Kata Kunci:** *E-procurement, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Efektivitas Pencegahan Fraud, Pengadaan Barang/Jasa.*

## **1. PENDAHULUAN**

*Fraud* ialah sebuah perilaku kecurangan yang disengaja dengan tujuan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri atau pun kelompok yang sifatnya melanggar hukum dan aturan yang berlaku. Biasanya dikerjakan oleh pihak yang mempunyai jabatan/kewenangan berkaitan dengan aset baik itu perusahaan ataupun negara. Kasus *fraud* kerap kali terjadi dalam instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) terlebih pada aktiitas pengadaan barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa sangat diperlukan oleh instansi pemerintah/BUMN/BUMD dalam mendukung kegiatan operasional, (Aminah, 2015).

*Fraud* yang sering ditemukan pada lingkungan sektor publik yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), maupun pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statements*). *Fraud* tersebut bias diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi (UU No. 20

tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa perbuatan curang dan perbuatan yang merugikan keuangan negara ialah satu diantara jenis-jenis tindak pidana korupsi). Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Presiden (PP) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik dan perubahan terakhir mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Di Kota Palembang, proses pengadaan barang dan jasa masih menggunakan cara *konvensional* meskipun sebagian sudah memanfaatkan pengadaan berbasis elektronik. Jika cara konvensional ini tetap digunakan, maka pertemuan langsung dengan pihak penyedia barang/jasa dinilai memiliki kelemahan, yaitu masih adanya praktik *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme* yang bisa saja berkembang sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Selain itu, cara *konvensional* ini juga menyita waktu yang lama sehingga dinilai tidak mencapai prinsip efektivitas dan efisiensi dalam hal waktu dan biaya, serta kurangnya persaingan antar pemasok yang disebabkan oleh pemberian hak tertentu oleh panitia pengadaan (Aminah, 2015). Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka pemerintah mengeluarkan aplikasi pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan *e-procurement*.

Menurut Sutedi (2014), Sistem yang dipakai dalam *e-procurement* dapat menjadi salah satu pemecahan serta perlengkapan untuk lembaga pemerintah/ BUMN/ BUMD buat menghindari terbentuknya fraud pengadaan benda ataupun jasa. *E-procurement* yang berupa suatu web yang ialah sistem lelang dalam pengadaan benda/ jasa oleh pemerintah dengan memakai fasilitas teknologi, data, serta komunikasi berbasis internet. Apabila merujuk pada Peraturan Presiden( Perpres) 70 tahun 2012, *e-procurement* berperan untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas, meningkatkan akses pasar serta persaingan usaha yang sehat, membetulkan tingkatan efisiensi proses pengadaan, menunjang proses monitoring serta audit, penuhi kebutuhan akses data yang real time. Dengan *e-procurement* proses lelang bisa berlangsung secara

efisien, efektif, bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif serta akuntabel.

Menurut Aminah(2015), dalam upaya memitigasi terjadinya fraud pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerinthan digunakan prosedur berupa *e-procurement*, dan *e-audit* yang cukup efisien. Implementasi sistem pengendalian internal dapat memitigasi terjadinya fraud pengadaan barang dan jasa yang dapat berdampak pada pengendalian internal dalam upaya pencegahan penyimpangan dalam proses pelelangan barang/jasa. Hal tersebut mengindikasikan jika adanya risiko penyimpangan di dalam tahapan pelelangan barang/jasa dapat di mitigasi dengan diterapkannya sistem pengendalian internal yang baik dan faktor-faktor lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya penelitian dari Nur Hidayah (2017), hasil riset tersebut menampilkan bahwa variabel mutu panitia pengadaan memiliki pengaruh secara signifikan serta negatif terhadap fraud pengadaan benda/ jasa. Penghasilan panitia pengadaan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap terhadap fraud pengadaan benda/ jasa, sistem serta prosedur pengadaan mempengaruhi secara signifikan serta negatif terhadap fraud pengadaan benda/ jasa, etika mempengaruhi secara signifikan serta negatif terhadap fraud pengadaan benda/ jasa serta sistem pengendalian internal mempengaruhi secara signifikan serta negatif terhadap fraud pengadaan benda/ jasa.

*E-procurement* ialah salah satu pendekatan terbaik dalam menghindari terjadinya fraud dalam pengadaan benda serta jasa pemerintah. *E-procurement* bisa jadi instrumen untuk mengurangi tindakan-tindakan kecurangan (*fraud*) sebab lewat *e-procurement*, lelang menjadi lebih terbuka sehingga hendak timbul tawaran tawaran yang lebih rasional, Faisol, I. A., (2014). Pelaksanaan *e-procurement* mempunyai kelemahan seperti kendala di wilayah yang memakai sistem pc untuk *e-procurement* kerap terjalin macet dikala menjelang deadline tender. Kelemahan tersebut diakibatkan sebab banyaknya aplikasi yang masuk dari para partisipan lelang yang menunggu sampai menjelang batasan akhir waktu penawaran dalam memasukkan aplikasi, perihal tersebut sebab kekurangmatangan teknologi data serta minimnya skill serta pengetahuan terhadap *e-procurement*.

Selain Penerapan *e-procurement* sangat penting dalam mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*), yaitu Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern ialah proses yang integral pada tindakan dan aktivitas yang dikerjakan secara terus menerus oleh pimpinan atau disebut juga bersiklus dan seluruh pegawai untuk menyajikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan bagian integral dari sistem akuntansi pemerintah. Instansi pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem Pengendalian internal yang baik.

Berbagai fenomena diatas menghasilkan kesimpulan bahwa terjadi permasalahan pengadaan barang/jasa dalam bentuk *fraud* yang penyebabnya karena sistem pengadaan yang belum dapat digunakan secara maksimal, kurangnya penegakan kebijakan/peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan kurangnya tenaga ahli dalam pelaksanaan *e-procurement*, serta masih adanya penyalahgunaan wewenang oleh tim pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dan masih lemahnya Sistem Pengendalian Internal dalam mencegah dan mendeteksi penggelapan (*Fraud*).

## 2. TELAAH LITERATUR

### *E-Procurement*

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 mengenai ketentuan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mana telah diperbarui dengan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 menyatakan jika “Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan proses dari pengadaan secara elektronik atau dikenal dengan *e-procurement*.”

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Di Indonesia, Sistem Pengendalian Internal (SPIP) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang menjabarkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral atas suatu tindakan dan aktivitas dikerjakan secara bersiklus serta berpola oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk bisa menyajikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### **Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Menurut PP 60 Tahun 2008, Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah antara lain:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian risiko (*Risk Assessment*)
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Internal

### **Tanggung Jawab Pelaksanaan SPIP**

Menurut Kurniawan (2014), tanggung jawab penerapan sistem pengendalian internal terletak pada manajemen. Dalam organisasi pemerintahan, menteri/ pimpinan lembaga, gubernur, serta bupati/ walikota bertanggung jawab atas daya guna penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal di setiap wilayah.

### **Efektivitas**

Menurut apa yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI”, Efektivitas ialah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai.

### ***Fraud (Kecurangan)***

Pengertian *Fraud* menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:11) “Dalam istilah sehari-hari, *fraud* dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.

### **Pengadaan Barang dan Jasa**

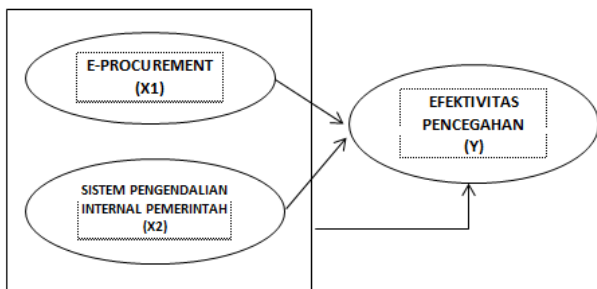
Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### **Objek Kegiatan Pengadaan.**

Objek kegiatan pengadaan adalah barang dan jasa yang selanjutnya disebut sebagai pengadaan barang/jasa meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

### **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan penjabaran dari tinjauan pustaka tersebut, adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

X1 = *E-Procurement*

X2 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Y = Efektivitas Pencegahan Fraud

Sesuai dengan kerangka pemikiran yang tergambar pada bagan tersebut, berikut ini hipotesis di dalam penelitian ini yaitu:

H1 : *E-procurement* mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud

H2 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud

H3: *E-procurement* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud

Dilihat dari gambar bagan kerangka pemikiran tersebut dapat diuraikan bahwa variabel independen yaitu *E-Procurement* (X1), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2), berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Efektivitas Pencegahan (Y) baik secara simultan maupun secara parsial.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang diambil adalah Pokja/UKPBJ pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Palembang. Populasi dalam penelitian ini adalah Pokja/UKPBJ yang berjumlah 29 OPD yang terdiri atas 24 Dinas dan 5 Badan, dengan responden sebanyak 116 orang yang terdiri dari Panitia pengadaan/Pokja pada UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa). Agar sampel yang diambil representatif, maka diperlukan suatu teknik pengambilan sampel yang tepat dan benar. Sugiyono (2012) mengungkapkan bahwa Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas beberapa objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang kemudian akan diterangkan oleh peneliti untuk mempelajari dan

kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan. Teknik yang dipilih dalam penelitian ini digunakan untuk menentukan sampel adalah teknik *Probability Sampling* dengan menggunakan metode *Sample Random Sampling*. Metode sample random sampling dilakukan dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada atau bagian populasi relative homogeny.

Penelitian ini memakai jenis penelitian kuantitatif, dimana peneliti mengolah data primer sebagai sumber data yang dipakai dalam penelitian. Data primer tersebut didapatkan dari kuisioner yang disebar ke seluruh karyawan yang berada di bagian Panitia Pengadaan/Pokja pada UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Kota Palembang.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

#### Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu tahap pengujian yang dilakukan pada isi (*content*) dari sebuah instrument, yang bertujuan sebagai pengukur ketepatan instrument yang digunakan dalam suatu penelitian.

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas Variabel X1**

Variabel	r hitung	r tabel	Keputusan
X1.1	0.334	0.182	Valid
X1.2	0.088	0.182	Tidak Valid
X1.3	0.262	0.182	Valid
X1.4	0.173	0.182	Tidak Valid
X1.5	0.223	0.182	Valid
X1.6	0.197	0.182	Valid
X1.7	0.271	0.182	Valid
X1.8	0.022	0.182	Tidak Valid
X1.9	0.376	0.182	Valid
X1.10	0.260	0.182	Valid

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas Variabel X2**

Variabel	r hitung	r tabel	Keputusan
X2.1	0.248	0.182	Valid
X2.2	0.495	0.182	Valid

X2.3	0.408	0.182	Valid
X2.4	0.34	0.182	Valid
X2.5	0.314	0.182	Valid
X2.6	0.185	0.182	Valid
X2.7	0.552	0.182	Valid
X2.8	0.535	0.182	Valid
X2.9	0.495	0.182	Valid
X2.10	0.387	0.182	Valid
X2.11	0.575	0.182	Valid
X2.12	0.434	0.182	Valid
X2.13	0.417	0.182	Valid
X2.14	0.423	0.182	Valid
X2.15	0.391	0.182	Valid
X2.16	0.403	0.182	Valid

**Tabel 3**

**Hasil Uji Validitas Variabel Y**

Variabel	r hitung	r tabel	Keputusan
Y1	0.270	0.182	Valid
Y2	0.211	0.182	Valid
Y3	0.271	0.182	Valid
Y4	0.443	0.182	Valid
Y5	0.321	0.182	Valid
Y6	0.451	0.182	Valid
Y7	0.420	0.182	Valid
Y8	0.403	0.182	Valid
Y9	0.503	0.182	Valid
Y10	0.154	0.182	Tidak Valid
Y11	0.241	0.182	Valid
Y12	0.249	0.182	Valid
Y13	0.108	0.182	Tidak Valid

Dari Tabel 1, 2, dan 3 tersebut, didapatkan hasil bahwa semua kuisioner dalam variabel X2 valid. Sementara, untuk variabel X1 terdapat tiga pertanyaan pada kuisioner yang tidak valid, dan pada variabel Y terdapat dua pertanyaan yang tidak valid pada kuisioner. Tolak ukur penilaian ini sendiri didasarkan pada nilai r Tabel sebesar 1,182.

**Uji Reliabilitas**

Uji ini bertujuan untuk menjamin instrument atau komponen yang dipakai apakah termasuk sebuah instrument yang handal, konsistens, stabil atau tetap dan dependibalitas sehingga jika dimanfaatkan berkali-kali bisa menghasilkan 40an lebih data yang sama. Kriteria pengujian instrumen bisa disebut andal jika r Hitung lebih besar dari r Tabel pada taraf signifikansi 5.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Variabel X1**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,677	16

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Variabel X2**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,677	16

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Variabel Y**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,2	13

Dari hasil uji reliabilitas Tabel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 diperoleh hasil dari nilai Cronbach Alpha pada variabel X1, X2, dan Y dengan nilai Cronbach > 0,6 kecuali pada variabel Y, sehingga variabel X1 dan X2 reliabel.

**Uji Normalitas**

Uji normalitas merupakan pengujian pada variabel yang diteliti dimaksudkan untuk mendeteksi data terdistribusi normal. Adapun kriteria jika data berdistribusi normal yakni data terdistribusi normal dan atau mendekati normal.

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Normalitas Data**  
**One- Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		116
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,14233250
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,064
	Negative	-,069
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data yang diolah, 2020.

Berdasarkan Tabel 7, menunjukkan jika nilai signifikansi Residual (Asymp. Sig. 2-tailed) yang diperoleh dari hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200 yang berarti signifikansi > 0,05 (0,200 > 0,05). Jadi, output dari nilai residual tersebut menggambarkan jika data terdistribusi nor-

mal dan data yang tersedia dapat digunakan dalam statistic.

**Uji Multikolinearitas**

Uji multikolonieritas digunakan untuk mendeteksi keterkaitan yang dimiliki variabel independen pada regresi.

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1,495	2,834		-,528	,599		
E-Procurement	,713	,063	,435	11,280	,000	,976	1,025
SPIP	,436	,023	,740	19,199	,000	,976	1,025

a. Dependent Variable : Pencegahan Fraud PBJ

Sumber : Data yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 8 dilihat bahwa nilai toleransi variabel *E-Procurement* ( $X_1$ ) sebesar 0,976, dan variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( $X_3$ ) sebesar 0,976. Kedua variabel ini menghasilkan nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10. Untuk nilai VIF pada variabel *E-Procurement* ( $X_1$ ) sebesar 1,025, dan variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ( $X_3$ ) sebesar 1,025. Kedua variabel ini juga menghasilkan nilai VIF yang kurang dari 10.

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya gejala multikolinearitas pada model regresi dalam penelitian ini.

**Uji Heterokedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji sebuah ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

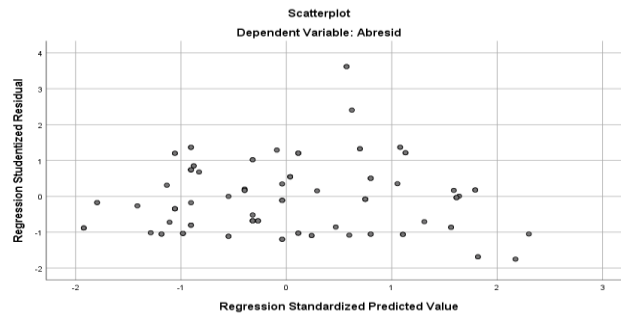
**Tabel 9**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model	Nilai Signifikansi	Titik Keritis
E-Procurement	0,082	0,05
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,465	0,05

Sumber: Data yang diolah, 202

Dari Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai signifikan variabel *E-Procurement* adalah sebesar 0,082, dan variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebesar 0,465. Nilai signifikan kedua

variabel ini melebihi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadinya gejala heterokedastisitas.



Sumber : Data yang diolah, 2020

**Gambar 1**  
*Scatterplots Regresi*

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak yaitu diatas angka 0 (nol) dan dibawah angka 0 (nol) serta penyebaran titik tidak membentuk pola tertentu seperti bergelombang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel independen. Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis dan melihat kekuatan hubungan antara Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa dengan *E-Procurement*, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

**Tabel 10**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,495	2,834		-,528	,599
E-Procurement	,713	,063	,435	11,280	,000
SPIP	,436	,023	,740	19,199	,000

a. Dependent Variable : Pencegahan Fraud PBJ

Sumber : Data yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 10 dapat diperoleh model persamaan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh *E-Procurement*, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang

Y = Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

$X_1$  = E-Procurement

$X_2$  = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

a = Konstanta

$b_1, b_2$  = Koefesien Regresi

e = error

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -1,495 + 0,435X_1 + 0,740X_2 + e$$

Keterangan:

**Hasil Uji Hipotesis**

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) berfungsi untuk menilai sejauh mana kesanggupan dari sebuah

model dalam menguraikan variasi variabel dependen.

**Tabel 11**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,915 <sup>a</sup>	,836	,833	1,152

a. Predictors: (Constant), SPIP, E-Audit, E-Procurement

b. Dependent Variabel : Pencegahan Fraud PBJ

Sumber : Data yang diolah,2020

**Pembahasan Per Siklus**

Diketahui pada Tabel 11 menunjukkan nilai Adjusted R Square 0,833 atau 83,3%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel *E-Procurement* (X<sub>1</sub>), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X<sub>2</sub>) secara simultan (bersama-sama) memberikan pengaruh sebesar 83,3% terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa (Y), sedangkan sisanya sebanyak 16,7% (100% - Adjusted R Square) merupakan besar kontribusi pengaruh lain yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil uji koefisien dilihat dari table di atas, diketahui bahwa nilai korelasi berganda dari keempat variabel tersebut adalah 0,915. Hal ini berarti terdapat hubungan positif antara variabel *E-Procurement* (X<sub>1</sub>), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X<sub>2</sub>) terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa (Y).

**Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)**

Uji statistik t berguna untuk mendeteksi keberadaan keterkaitan pada variabel independen secara tersendiri dalam menguraikan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013)

**Tabel 12**  
**Hasil Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,495	2,834		-,528	,599
E-Procurement	,713	,063	,435	11,280	,000
SPIP	,436	,023	,740	19,199	,000

a. Dependent Variable : Pencegahan Fraud PBJ

Sumber : Data yang diolah, 2020

Berikut penjelasan mengenai Tabel 12 :

1. Nilai *t<sub>hitung</sub>* pada variabel *E-Procurement* sebesar 11,280 dengan nilai *t<sub>tabel</sub>* sebesar 1,980. Nilai *t<sub>hitung</sub>* > *t<sub>tabel</sub>* maka hipotesis pertama (H1) dapat diterima. Diketahui pula nilai signifikan pada variabel *E-Procurement* sebesar 0,00 artinya nilai signifikansi pada variabel *E-Procurement* lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel *E-Procurement* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.

2. Nilai *t<sub>hitung</sub>* pada variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebesar 19,199 dengan nilai *t<sub>tabel</sub>* sebesar 1,980. Nilai *t<sub>hitung</sub>* > *t<sub>tabel</sub>* maka hipotesis kedua (H2) dapat diterima. Diketahui pula nilai signifikan pada variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebesar 0,00 artinya nilai signifikansi pada variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh secara signifikan ter-



hadap variabel Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.

### Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F adalah sebuah uji untuk memastikan apakah semua variabel independen atau bebas memiliki keterkaitan secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).

**Tabel 13**  
**Hasil Uji Simultan (Uji F)**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression Residual Total	766,856 150,066 916,922	3 113 115	383,428 1,328	288,722	,000 <sup>b</sup>

- Dependent Variabel : Pencegahan Fraud PBJ
- Predictors : (Constant), SPIP, E-Procurement

Sumber : Data yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 13 menunjukkan jika nilai  $F_{hitung}$  sebesar 288,722 dengan taraf signifikan 0,000 sedangkan nilai  $F_{tabel}$  diketahui sebesar 2,68. Hal tersebut mengindikasikan bahwa nilai  $F_{hitung} >$  nilai  $F_{tabel}$  sehingga dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen seperti *E-Procurement* (X1), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2) secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa (Y).

## PEMBAHASAN

### Pengaruh *E-Procurement* terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel *E-Procurement* adalah sebesar 11,280, sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,980. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga hipotesis yang diambil adalah  $H_o$  ditolak  $H_a$  diterima. Nilai signifikan variabel *E-Procurement* yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,000 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh yang dihasilkan juga signifikan dan dengan melihat hasil dari koefisien regresi dengan arah positif maka pengaruh yang dihasilkan juga positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada *E-Procurement* terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) merupakan sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan berbasis pada pemanfaatan teknologi di era digital melalui transaksi elektronik sesuai dengan regulasi yang terkait dengan proses pengadaan barang dan atau jasa pemerintah dapat berjalan secara efektif, akuntabel, efisien dan

transparan. *E-procurement* merupakan upaya dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat yang dimaksudkan untuk bisa memitigasi potensi penyalahgunaan atau fraud di lingkup pemerintahan. Hal tersebut dimaksudkan agar kegiatan pengadaan barang dan atau jasa terhindar dari *fraud*. Sehingga, pengadaan barang/jasa menjadi lebih transparan dan kegiatan terlaksana sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa Penerapan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa terbukti dengan adanya pengaruh penerapan *e-procurement* dapat meminimalisir tindakan *fraud*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et al (2018) menjelaskan bahwa sistem *e-procurement* berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang telah menerapkan pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) dilihat dari karakteristik responden berdasarkan sudah diterapkannya pengadaan secara elektronik. Dari 116 responden dalam penelitian ini hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang telah menerapkan pengadaan secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang telah meminimalisir terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan telah diterapkannya pengadaan secara elektronik (*E-procurement*).

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah sebesar 19,199, sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,980. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga hipotesis yang diambil adalah  $H_o$  ditolak  $H_a$  diterima. Nilai signifikan variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,000 yang artinya kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh yang dihasilkan juga signifikan dan dengan melihat hasil dari koefisien regresi dengan arah positif maka pengaruh yang dihasilkan juga positif, sehingga bisa disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif secara signifikan pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang/jasa. Sistem pengendalian internal secara tidak langsung menciptakan pengawasan yang melekat sehingga tidak ada lagi oknum yang menyalangunakan wewenang atau kekuasaan. Hasil penelitian ini didukung oleh teori mengenai konsep sistem pengendalian internal yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal pemerintah yang menjelaskan bahwa tujuan dari sistem pengendalian internal ialah bertujuan untuk menyajikan jaminan atas keyakinan memadai demi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Lea, (2018). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Purwitasari (2014) menjelaskan bahwa Pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang di rumah sakit di Bandung. Jadi jika variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diterapkan dengan baik, maka hal tersebut mungkin dapat mengurangi atau mencegah kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan dalam organisasi.

### **Pengaruh *E-Procurement*, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa**

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi secara simultan (Uji F) penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel *E-Procurement*, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa. Hasil perhitungan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 288,722 lebih besar dari nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,68 dan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pada variabel *E-Procurement*, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa.

Dari hasil analisis kekuatan hubungan secara simultan atau analisis untuk mengetahui seberapa besarnya variabel bebas (independen) menjelaskan variabel terikat (dependen), maka diketahui bahwa koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,833 atau 83,3%. Sedangkan sisanya sebesar 16,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati di dalam penelitian ini. Nilai 83,3% menjelaskan bahwa variabel Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dipengaruhi oleh *E-Procurement*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebesar 83,3% pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Dari hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial maupun simultan atau bersama-sama, *E-Procurement*, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik diterapkannya pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) di lingkungan pemerintah khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang diharapkan dapat mencegah terjadi *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Adapun bagian yang tidak kalah penting, bahwa fungsi dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah itu sendiri sebagai alat untuk mengetahui apakah seluruh pegawai telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

## SARAN

Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam *E-Procurement*, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dapat mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa sehingga dapat mengurangi atau menimalisir terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa pada wilayah Kota Palembang. Termasuk juga bagi Auditor Internal yaitu APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan Inspektorat diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan menjalankan perannya dengan baik agar dalam upaya pencegahan *fraud* PBJ di OPD Kota Palembang dapat diatasi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, A. S. (2015). Pengaruh E-Procurement dan E- Audit Terhadap Efektivitas Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. *Skripsi*.
- Faisol, I. A., & S. M. (2014). *Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik*.
- Ghozali. (2013a). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013b). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (7th ed.). Universitas Diponegoro.
- Kurniawan, A. (2014). *Fraud di Sektor Publik dan Integritas Nasional*. Yogyakarta: BPFE.
- Lea, dkk. (2018). Pengaruh Penerapan E-Procurement SPIP dan Kompetensi SDM terhadap Pencegahan Fraud Barang dan Jasa. *Skripsi*.
- Nugroho et al. (2018). Pengaruh Implementasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Terhadap Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Nur Hidayah, J. M. . M. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud dalam Kegiatan PBJ. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 4.
- Purwitasari. (2014). *Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi dalam Pencegahan Fraud PBJ*.
- Pusdiklatwas bpkp. (2008). *Etika dalam Fraud*. Jakarta: BPKP, 11.